

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak geografis Kota Kediri

Secara geografis wilayah Kota Kediri terletak diantara $111^{\circ}15'$ – $112^{\circ}03'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}45'$ – $7^{\circ}55'$ Lintang Selatan, Total daratan

Kota Kediri seluas 63,40 Km², terbagi menjadi tiga Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Mojojoto,
2. Kecamatan Kota
3. Kecamatan Pesantren.

Secara administratif, Kota Kediri terbagi menjadi 3 kecamatan dan 46 kelurahan, yang terdiri dari 85 lingkungan, 1.417 RT dan 319 RW.

Wilayah Kecamatan Kota meliputi 17 Kelurahan, 20 lingkungan, 473 RT dan 99 RW. Kecamatan Pesantren meliputi 15 Kelurahan, 29

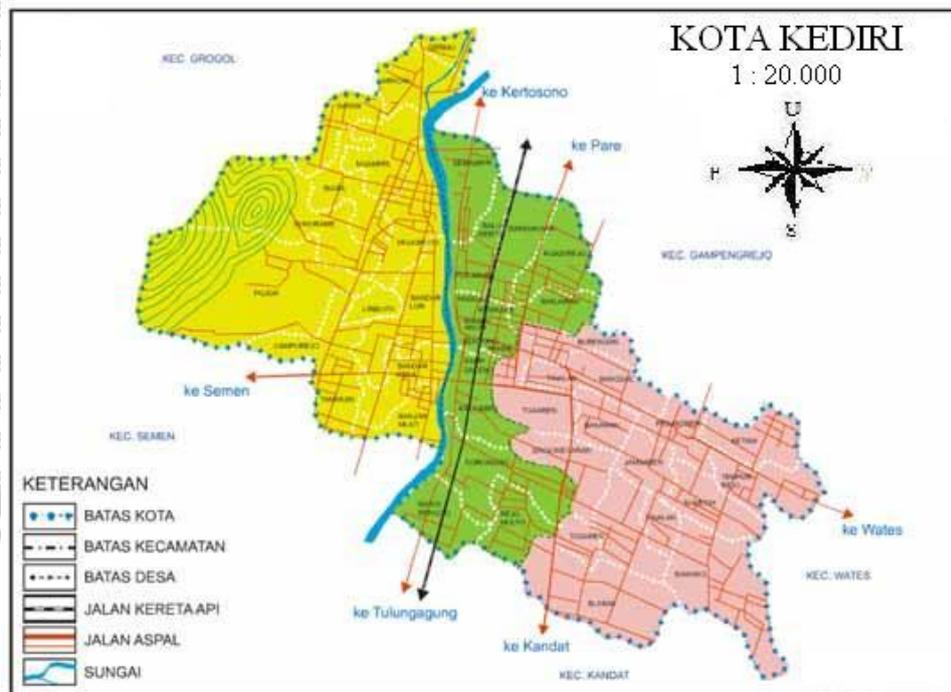
lingkungan, 492 RT dan 124 RW, dan Kecamatan Mojojoto meliputi 14 Kelurahan, 36 lingkungan, 452 RT dan 96 RW. Wilayah barat yang

termasuk dalam wilayah Kecamatan Mojojoto dengan luas wilayah 24,61 km², dan timur sungai sebagian termasuk dalam wilayah

Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren masing-masing dengan luas wilayah 14,90 km² dan 23,90 km².

Gambar 4.1

Peta Administratif Kota Kediri



Posisi Kota Kediri sangat strategis mengingat terletak di jalur lintasan antara Blitar-Nganjuk, Surabaya-Tulungagung, dan Kabupaten Kediri-Nganjuk. Sehingga Kota Kediri dapat diibaratkan seperti kuning telur pada telur ceplok, artinya Kota Kediri menjadi pusat pertumbuhan bagi daerah disekitarnya. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan semen dan Banyakan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Guruh dan Wates, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngadiluwih dan Kandat, sebelah utara berbatasan dengan Kec. Gampengrejo.

Kota Kediri merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki beberapa gunung, yaitu gunung Maskumambang dan Klothok.

Sungai Ngampel sepanjang 4,50 km. Dari kelima sungai tersebut terbesar dan terkenal. Sungai Brantas adalah legenda bagi masyarakat Kota Kediri juga legenda Propinsi Jawa Timur. Dari sungai inilah perkembangan sejarah peradaban Kediri bermula. Di Kota Kediri terdapat 21 sumber mata air, 7 diantaranya ada di Kecamatan Mojoroto dan 14 sumber ada di Kecamatan Pesantren, yang memiliki debit paling besar adalah sumber sendang (10-60 liter/detik) dan sumber Banteng (10 – 112 liter/detik). Potensi ini dapat mendukung kebutuhan air bersih bagi penduduk sehari-hari seperti mandi, memasak dan mencuci.

Dari segi lahan, penggunaan Lahan di Kota Kediri kebanyakan digunakan sebagai lahan terbangun. Dominasi penggunaan lahan kepadatan tertinggi adalah pada Kecamatan Kota dengan persebaran perkantoran, industri, tempat wisata dan pemukiman. Penggunaan lahan untuk Kecamatan Mojoroto didominasi oleh pariwisata, pendidikan, home industry dan pertanian serta pemukiman kepadatan sedang dan rendah. Untuk Kecamatan Pesantren, dominasi penggunaan lahannya yaitu industri, perkantoran, home industri, permukiman pertanian.

b. Visi dan Misi Kota Kediri

Untuk dapat mewujudkan Kota Kediri yang indah dan makmur Kota

Kediri memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

1. VISI

Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing,
Berakhlak dan Tanpa Korupsi

2. Misi

Kota Kediri memiliki misi sebagai berikut :

a. Misi 1

Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel,
efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi public dalam
pembangunan

b. Misi 2

Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah
lingkungan.

c. Misi 3

Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera,
berbudaya dan sebagai pusat Pendidikan.

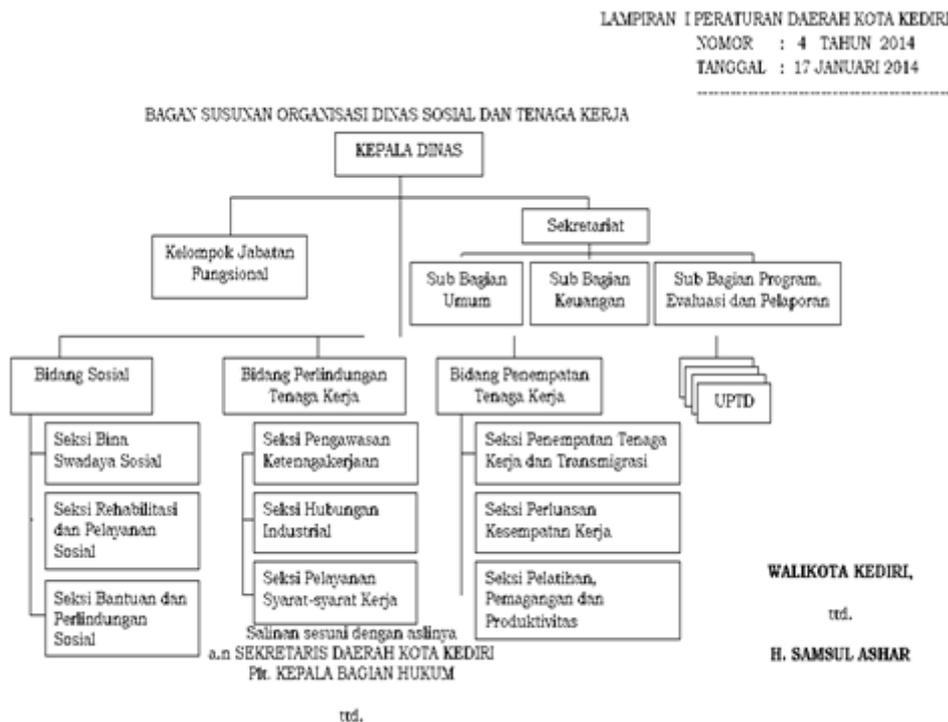
d. Misi 4

Memperkuat Ekonomi Kerakyatan menuju terwujudnya Kota
Kediri sebagai Pusat Perdagangan, Jasa, Wisata, dan Industri
Kreatif.

c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri

Gambar 4.2

Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri



Sumber :Data sekunder Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Visi dan Misi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

a. Visi

Menjadi Penyelenggara Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sosial yang Handal dan Bermartabat

b. Misi

1. Meningkatkan tenaga kerja yang kompetitif dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja



2. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial

3. Meningkatkan Kualitas pelayanan terhadap penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara komperhensif

c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi :

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terletak di Jl. Brigjen Imam Bachri, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Merupakan unsur pelaksana bidang sosial dan tenaga kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan sosial dan tenaga kerja berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis dibidang sosial dan tenaga kerja;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial dan tenaga kerja;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial dan tenaga kerja; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi :

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Keuangan
2. Sub Bagian Pelaporan, Evaluasi dan Program
3. Sub Bagian Umum.

c. Bidang Sosial, membawahi :

1. Seksi Bantuan dan Pembinaan Sosial
2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
3. Seksi Bina Swadaya Sosial

d. Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja, membawahi :

1. Seksi Pembinaan dan Syarat - syarat Kerja dan Organisasi Pengusaha / Pekerja;
2. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Seksi Pelatihan dan Produktifitas

d. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :

1. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
3. Seksi Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kerja.

e. UPTD, membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Sub Bagian Tata Usaha.

jumlah penduduk miskin cukup banyak di tahun 2013 yang termasuk data terakhir yang sudah di rekap, penduduk miskin mencapai 14.859. dengan

adanya pelaksanaan pemberian santunan kematian sangat meringankan

beban dari masyarakat miskin. Berdasarkan realita, pelaksanaan pemberian

santunan di Kota Kediri sudah berjalan sesuai aturan. Akan

tetapi berdasarkan wawancara dengan Bapak Mustamar perwakilan dari

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengatakan bahwa:²

“Semuanya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa pelaksanaan dalam pemberian santunan belum bisa dioptimalkan. Hal ini berhubungan dengan adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga tujuan dari adanya pemberian santunan kematian belum dapat dilaksanakan dengan baik.”

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi masyarakat Miskin yang ada di Kota Kediri adanyamaksud dan tujuan pemberian santunan kematian bahwa santunan kematian diberikan bagi masyarakat penduduk miskin Kota Kediri adalah sebagai wujud dari kepedulian Pemerintah Daerah dapat membantu masyarakat-masyarakat miskin yang ada di daerah yang meninggal dunia. Dalam maksud dan tujuan Pemerintah Daerah Kota Kediri ingin meringankan beban keluarga almarhum dengan cara member santunan kematian. Berikut tabel pemberian santunan kematian:

² Wawancara dengan Bapak Mustamar Perwakilan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri.

Tabel 4.1.

Tabel Tanda Terima Dana Santunan Kematian

NO	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah orang	Jumlah Dana
		Laki-laki	Perempuan		
1	2014	18	20	38	Rp. 19.000.000,00
2	2015	48	81	129	Rp. 64.500.000,00

Sumber :Data sekunder Dinas Sosial dan Tenaga Kerja diolah

Berdasarkan tabel diatas dana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Kediri setiap tahunnya berkisar Rp. 3.000.000.000,00 akan tetapi dana yang terpakai pada tahun 2014 berjumlah Rp.19.000.000,00 dan pada tahun 2015 berjumlah Rp. 64.500.000,00, Sedangkan yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan santunan kematian dari pemerintah sangat banyak akan tetapi hanya beberapa saja yang mendapat bantuan, yang sebenarnya masih banyak dana dari pemerintah yang belum digunakan secara optimal didalam melaksanakan pemberian santuan kematian yang bertujuan untuk meringankan beban keluarga miskin yang anggotanya meninggal dunia. Pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan dana yang sudah ada serta tanpa mengajukan persyaratan-persyaratan yang menyulitkan untuk di pahami oleh masyarakat miskin, persyaratan-persyaratan yang diajukan berupa :

1. Permohonan kepada Bapak Walikota
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk Almarhum dan atau Kartu Keluarga
3. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atau Kartu Keluarga Pemohon

4. Fotocopy Surat Pengantar Kematian dari Kelurahan
5. Fotocopy Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Surat Keterangan Miskin atau tidak mampu dari Kelurahan
7. Surat Keterangan Lahir Mati (khusus usia kurang dari 17 tahun / belum punya KTP)
8. Pakta Integritas
9. Surat Persyaratan dan Laporan Penggunaan Dana

Persyaratan-persyaratan diatas dalam kenyataanya memerlukan waktu lebih dari 14 hari yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sedangkan masyarakat untuk melakukan pengurusan persyaratan tersebut lebih dari 14 hari. Dalam persyaratan nomor 1 menyebutkan bahwa harus adanya permohonan dari Bapak Walikota, sedangkan tidak semua masyarakat miskin banyak yang tidak mengerti tata cara untuk mengajukan permohonan kepada Bapak Walikota. Adapun contoh dari Bapak Eko³ selaku Wali dari Almarhuma Ibu Sрни mengatakan bahwa beliau merasa kesulitan dalam tata cara pengurusan surat kepada Bapak Walikota. Beliau merasa bingung bagaimana membuat surat tersebut dan diberikan kepada siapa. Hal ini disebabkan pendidikan terakhir Bapak Eko adalah SMP.

³ Wawancara dari Bapak Eko Perwakilan Wali dari Almahum, Pada Tanggal 9 April 2015

Gambar 4.2

Foto Dengan Bapak Eko dan Ibu Eni



Persyaratan kedua mengenai fotocopy akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, normalnya penerbitan akta kematian membutuhkan waktu lebih dari 7 hari. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi persyaratan lengkap hanya 14 hari. Belum lagi persyaratan nomor 9 mengenai surat pernyataan dan laporan penggunaan dana, tidak semua masyarakat miskin mengetahui dan memahami persyaratan tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin hanya berpikiran bahwa dana yang turun akan mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Apalagi dana yang dikeluarkan dari Pemerintah Daerah hanya Rp. 500.000 per wali dari almarhum.

3. Hambatan-Hambatan yang Dialami Oleh Pemerintah Kota Kediri dalam Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri.

Menurut Wawancara yang dilakukan kepada Bu Endang Pembina utama muda Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri, ia mengatakan bahwa banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi dari Dinas Sosial Dan Ketenagakerjaan atau yang berasal dari masyarakatnya sendiri.⁴ Faktor-faktor yang terjadi yang antara pihak dinas dengan masyarakat sendiri juga mempengaruhi pelaksanaan dari pemberian santunan kematian kurang berjalan dengan baik, sehingga tidak semua masyarakat miskin yang mendaftarkan diri tidak mendapatkan santunan kematian tersebut.

Faktor faktor tersebut diantara lain :

a. Dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan

Faktor-faktor yang berasal dari Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan menurut Bu Endang di bagian Seksi Sosial antara lain :

1. Kurangnya terjalannya sosialisasi antara Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan dengan masyarakat miskin.

Kurangnya sosialisasi ini sangat berpengaruh bagi masyarakat miskin yang memang rata-rata memiliki riwayat pendidikan yang cukup rendah sehingga kurang dapat memahami tata cara bagaimana untuk mendaftarkan dan memahami persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan uang dari santunan kematian, yang sebenarnya masyarakat sendiri pun cukup membutuhkan uang dari santunan kematian tersebut. Dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan

⁴ Hasil wawancara dengan Bu Endang dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan kota Kediri pada tanggal 8 juli 2015

itu sendiri kurang adanya petugas untuk memberikan sosialisasi berupa informasi tentang ketentuan-ketentuan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat menerima pemberian santunan kematian.

Seharusnya Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan harus lebih efektif dalam penyampaian informasi dari pemberian santunan kematian, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik seharusnya dilakukan sosialisasi dari rumah ke rumah dari masyarakat miskin yang telah terdaftar.

2. Adanya Pemilihan Walikota yang menyebabkan lambanya dikeluarkannya surat dari persetujuan dari walikota

Dengan adanya pemilihan walikota pada tahun 2014 juga menyebabkan surat keterangan dari walikota terlambat untuk turun kepada masyarakat miskin Kota Kediri yang mendaftarkan diri untuk menerima santunan kematian yang seharusnya surat keterangan dari walikota merupakan syarat utama untuk mendapatkan santunan kematian. dengan adanya keterlambatan ini masyarakat miskin tidak dapat memproses syarat-syarat yang lebih lanjut, Yang syarat-syarat itu harus terpenuhi sebelum masa waktu selama 14 hari. Sedangkan dengan adanya keterlambatan tersebut membuat masyarakat sendiri yang dirugikan.

3. Kurangnya Perhatian Dari Masing-Masing Kelurahan

Pihak dari kelurahan seharusnya turut berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan kurangnya kerjasama dalam

melakukan sosialisasi serta pihak kelurahan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan santunan kematian itu belum terjalin, seperti adanya miss komunikasi antara pihak kelurahan dan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat belum terserap sepenuhnya, yang berakibat masyarakat miskin belum sepenuhnya mengerti dengan tata cara serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum uang dari santunan kematian dapat di berikan, Dikarenakan Kelurahan lah yang lebih mengetahui keadaan masyarakat miskin yang ada di daerahnya seharusnya dapat berkerjasama dengan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam pemberian santunan kematian tersebut.

b. Dari Masyarakat Miskin Kota Kediri

Faktor yang terjadi bukan hanya dari Pemerintah daerah saja melainkan datang juga dari masyarakat miskinnya sendiri, antara lain :

1. Riwayat pendidikan yang rendah yang ada di masyarakat

Faktor riwayat pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat untuk mamahami bagaimana tata cara atau prosedur dalam pengajuan santunan kematian. Di kota Kediri sendiri masyarakat miskin tingkat pendidikannya juga tergolong rendah, kebanyakan masyarakat miskin hanya mampu menempuh pendidikannya sampai tingkat SMP bahkan ada yang hanya sampai tingkat SD. Hal ini yang menjadi kendala dari

masyarakat miskin untuk mengurus surat-menyurat untuk mengajukan permohonan santunan kematian dari pemerintah Kota Kediri.

2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memperoleh informasi tentang bantuan pemberian santunan kematian.

Faktor kurangnya kesadaran dari Masyarakat Miskin di Kota Kediri untuk memperoleh informasi tentang bantuan pemberian santunan kematian disini juga dipengaruhi dari tingkat pendidikan atau SDM masyarakat miskin di Kota Kediri Yang rendah, yang kebanyakan hanya lulusan SMP DAN SD. Selain itu juga dipengaruhi juga dari kurangnya sosialisasi mengenai pemberian santunan kematian bagi Masyarakat miskin Di Kota Kediri. Yang membuat masyarakat miskin Di Kota Kediri buta pemahaman tentang adanya program pemberian santunan kematian yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Kediri kepada masyarakat miskin di wilayah pemerintahannya.

4. Upaya-Upaya Apa Saja yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota

Kediri Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan

Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri.

Menurut Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Mustamar, Pembina utama muda Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri, ia mengatakan “bahwa sudah ada usaha dari pihak dinas untuk dapat memaksimalkan dari

pemberian santunan kematian tersebut. Usaha yang sudah dilakukan oleh dinas antara lain :⁵

1. Usaha Dari pemberian Informasi dari Rumah ke Rumah

Dinas sosial dan ketenagakerjaan sudah berusaha dalam memaksimalkan Pemberian Informasi tentang Santunan kepada masyarakat miskin yang memang membutuhkan dengan tujuan agar dapat meringankan beban dari keluarga yang sedang berduka. Dengan usaha yang dilakukan dinas ini sungguh sangat membantu akan ketidaktahuan dari masyarakat jika ada bantuan dari pemerintah tentang adanya pemberian santunan kematian. Agar masyarakat tidak mengalami kebingungan akan ketidaktahuan dari adanya program pemberian santunan kematian, maka pihak dari dinas melakukan inisiatif demi melancarkan pemberian santunan kematian secara merata dengan cara pemberian informasi dari rumah ke rumah agar lebih efektif dalam pemberitahuan serta masyarakat dapat bertanya dengan jelas maksud dan tujuan dari pemberian santunan kematian tersebut.

Peneliti merasa sedikit kecewa dikarenakan upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan hanya sebatas pemberian informasi dari rumah ke rumah saja. Itupun belum sepenuhnya efektif dikarenakan kurangnya tenaga kerja dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan untuk memberi informasi dari rumah ke rumah jadi belum semuanya mendapat informasi

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Mustamar dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Pada Tanggal 8 juli 2015

dari santunan kematian tersebut dikarenakan adanya kendala kurangnya tenaga kerja. Adanya upaya-upaya juga yang belum dilakukan oleh Dinas

Sosial dan Ketenagakerjaan untuk memaksimalkan pelaksanaan dari pemberian santunan kematian, seperti :

1. Berkoordinasi dengan Kelurahan Untuk Meakukan Sosialisasi serta Pendataan Masyarakat Miskin di Masing-Masing Kelurahan

Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan harusnya dapat bekerjasama agar lebih memudahkan dalam pendataan keluarga miskin yang memang berhak menerima santunan kematian tersebut, dengan berkoordinasi dengan pihak dari Kelurahan maka Dinas pun akan mendapat data dengan jelas serta dalam melakukan sosialisasi untuk mengumpulkan masyarakat pun akan berjalan sedikit lebih mudah dikarenakan adanya koordinasi dari pihak kelurahan yang memang yang lebih tau kondisi dari masyarakatnya sendiri.

2. Penambahan tenaga kerja dalam melakukan upaya pemberian informasi dari rumah ke rumah

upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan sudah cukup baik akan tetapi kurang memaksimalkan untuk pelaksanaan dari pemberian santunan kematian dikarenakan kurangnya jumlah tenaga kerja dalam upaya pemberian informasi tentang pelaksanaan pemberian santunan kematian, seharusnya dengan adanya tindakan seperti ini pegawai dilapangan ditambah agar dapat mencakup rumah ke rumah masyarakat miskin secara keseluruhan.

Dalam menemukan solusi dari berbagai hambatan yang dialami Pemerintah Kota Kediri dapat diselesaikan jika melihat dan berpedoman pada teori, yakni:

1. Faktor hambatannya: yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor Penegak Hukum: yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat: yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan: sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁶

⁶ Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1986.Hlm 5.